



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD NASRULLOH
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 806830

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.025.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m²/100 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 470.000.000
2. Tanah Seluas 365 m² di KAB / KOTA MAGELANG, WARISAN Rp. 55.000.000
3. Tanah Seluas 456 m² di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
4. Tanah Seluas 124 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
5. Tanah Seluas 220 m² di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
6. Tanah Seluas 339 m² di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 489.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 V Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
4. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 29.360.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	354.095.466
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.897.455.466
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.897.455.466

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.